

Questionnaire

No	Variables	Questions
1	Intra-Service Cooperation	Integrasi dan rekonstruksi peraturan-peraturan perbatasan (omnibus law) seperti kebijakan, ketentuan/ SOP pemeriksaan kru, penumpang, pelintas batas, alat angkut; persyaratan masuk, penolakan masuk, denda/ biaya beban, dsb.
2		Integrasi kebijakan anggaran termasuk pemasukan (Pajak dan PNB/ revenue collection) antara DJBC dan Ditjenim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3		Integrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) secara struktur (Orta), visi-misi, fungsi, peran, tugas dalam satu Kementerian (di Kementerian Keuangan, atau di Kementerian Hukum dan HAM atau menjadi Kementerian Baru).
4		Integrasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) seperti Kantor Bea dan Cukai dengan Kantor Imigrasi di setiap daerah yang beroperasi di pintu-pintu masuk (Bandara, Pelabuhan, PLBN).
5		Integrasi Bidang atau Unit di bawah Kantor Bea Cukai dan Kantor Imigrasi di seluruh pintu-pintu masuk (Bandara, Pelabuhan, PLBN).
6		Integrasi manajemen risiko (risk management), manajemen perbatasan (border management), uji kualitas (quality control) antara DJBC dan Ditjenim.
7	Inter-Agency Cooperation	Integrasi proses pemeriksaan Imigrasi dan Bea Cukai di seluruh pintu-pintu masuk (Bandara, Pelabuhan, PLBN) termasuk pengambilan keputusan.
8		Integrasi sistem informasi dan teknologi dalam proses pemeriksaan Imigrasi dan Bea Cukai di seluruh pintu-pintu masuk (Bandara, Pelabuhan, PLBN).
9		Integrasi tugas dan fungsi, kewajiban/ tanggung jawab dalam proses pemeriksaan Imigrasi dan Bea Cukai di seluruh pintu-pintu masuk (Bandara, Pelabuhan, PLBN).
10		Integrasi patroli keamanan perbatasan bersama antara Imigrasi dan Bea Cukai di seluruh pintu-pintu masuk (Bandara, Pelabuhan, PLBN).
11		Integrasi pelatihan-pelatihan keamanan perbatasan, keimigrasian, bea cukai, penegakan hukum perbatasan (peningkatan SDM)
12		Integrasi proses rekrutmen pegawai baru melalui satu sumber: standar, kualifikasi, kompetensi, kapabilitas.
13	International Cooperation	Membangun integrasi kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan pihak perbatasan (CIQ) negara tetangga (berbatasan langsung) seperti dengan ALO, ICA, ABF, Imigrasi Malaysia, dsb.
14		Membangun integrasi kerja sama, koordinasi dan komunikasi bilateral dan regional seperti dengan Kedutaan Besar, IOM, WCO, KIS, ICAO, IMO, ASEAN, MEA, operator alat angkut.
15		Membangun integrasi kerja sama, koordinasi dan komunikasi antarlembaga penegak hukum dalam negeri seperti dengan TNI, Polri, Bakamla, BNPP, KKP, BNPT, BIN dsb.

16		Membangun integrasi kerja sama, koordinasi dan komunikasi antarlembaga penegak hukum internasional seperti dengan AFP, Interpol, FBI, dsb.
17		Membangun integrasi kerja sama, koordinasi dan komunikasi multilateral seperti dengan PBB (United Nations), OKI, APEC, OPEC, World Bank, WTO dsb.
18		Membangun integrasi kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan pihak bandara dan pelabuhan internasional di luar negeri dalam hal pemeriksaan imigrasi dan bea cukai pra-kedatangan (border pre-clearance).
19		Menurut Anda, bentuk integrasi institusi perbatasan yang ideal antara DJBC dan Ditjenim di perbatasan negara (Bandara, Pelabuhan, PLBN): A. Tim Satgas Gabungan (Joint Task-Force) B. Integrasi Institusi (seperti ABF, ICA, Fontex, CBP, ICE)